

Polarisasi Politik dalam Pemilu 2024: Pro dan Kontra Prabowo sebagai Presiden dalam bayang-bayang 1997/1998

Seraphim Virgine Tadjia^{1*}, Septio Mufti Akbar², M. Asif Nur Fauzi³

¹ Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom Surabaya, Indonesia; seraphimvirginetadja@gmail.com

² Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom Surabaya, Indonesia; firstgalodo@gmail.com

³ STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan, Indonesia; asif.elek24@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

political polarization,
election,
Prabowo Subianto,
reform,
public perception.

Article history:

Received : 2025-06-11

Revised : 2025-08-05

Accepted : 2025-08-15

DOI:

<https://doi.org/10.26593/z32tg022>

ABSTRACT

Indonesia's 2024 presidential election marks a critical juncture in the country's democratic development, characterized by increasing political polarization. Prabowo Subianto's renewed candidacy has triggered intense public debate between supporters and critics. This polarization stems not only from ideological and political identity differences but is also reinforced by social media dynamics and lingering public memory of the 1997/1998 reform era, where Prabowo remains a controversial figure. This paper aims to analyze the causes of political polarization in the context of Prabowo's candidacy, evaluate the arguments for and against him, and examine how historical narratives shape public perception. Employing a qualitative-descriptive method through literature review, the study finds that issues of human rights, militaristic leadership style, and political communication strategies significantly shape public opinion. While some reject Prabowo due to unresolved historical trauma, others see his transformation and leadership experience as valuable assets. This study concludes that political education and neutral media play a vital role in mitigating polarization and reinforcing the foundations of democracy.

ABSTRAK

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi titik krusial dalam perjalanan demokrasi, ditandai oleh meningkatnya polarisasi politik. Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai presiden, yang memicu perdebatan publik antara pendukung dan penentang. Polarisasi ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan ideologi dan identitas politik, tetapi juga diperkuat oleh peran media sosial dan memori kolektif masyarakat terhadap peristiwa 1997/1998 yang masih membayangi figur Prabowo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab polarisasi dalam konteks pencalonan Prabowo, mengevaluasi argumen pro dan kontra, serta menelaah dampak masa lalu terhadap persepsi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, hasil kajian menunjukkan bahwa isu pelanggaran HAM, gaya kepemimpinan militeristik, serta strategi komunikasi politik sangat memengaruhi pembentukan opini publik. Sebagian masyarakat menolak Prabowo karena trauma sejarah, sementara yang lain menilai perubahan sikap dan pengalamannya sebagai potensi positif untuk masa depan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan politik dan media yang netral sangat dibutuhkan untuk meredam polarisasi dan memperkuat demokrasi.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan bangsa. Di Indonesia, Pemilu 2024 menandai babak penting dalam sejarah demokrasi kontemporer, tidak hanya sebagai momentum politik lima tahunan, tetapi juga sebagai refleksi atas memori kolektif dan trauma sejarah bangsa. Salah satu fenomena paling menonjol dalam kontestasi kali ini adalah menguatnya polarisasi politik, terutama yang berkaitan dengan pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden. Polarisasi politik merupakan fenomena yang kerap muncul dalam wacana politik kontemporer. Istilah ini merujuk pada perpecahan masyarakat ke dalam dua kelompok yang memiliki kepentingan, arah tujuan, atau posisi yang saling bertentangan. Dalam konteks politik, polarisasi menggambarkan adanya perbedaan tajam dalam keyakinan, pandangan, serta sikap politik antara dua kubu yang berseberangan, yang sering kali sulit untuk dipertemukan (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Polarisasi tersebut bukan semata-mata lahir dari dinamika politik modern, tetapi juga dipengaruhi oleh rekam jejak sejarah yang belum sepenuhnya terselesaikan di ruang publik: peristiwa 1997/1998.

Polarisasi politik sendiri merujuk pada keterbelahan masyarakat dalam dua kutub ekstrem yang saling bertentangan, baik dalam hal ideologi, nilai, hingga pilihan politik. Dalam konteks Indonesia, polarisasi menjadi semakin nyata sejak era reformasi, terlebih dengan makin masifnya peran media sosial dalam membentuk opini publik. Pencalonan Prabowo sebagai presiden dalam Pemilu 2024 memperkuat garis pembelahan ini. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukungnya dengan alasan pengalaman, ketegasan, dan transformasi citra politik. Di sisi lain, sebagian masyarakat menolak keras dengan mengacu pada keterlibatannya dalam peristiwa kelam masa lalu, khususnya dugaan pelanggaran HAM pada 1997/1998. Peristiwa tersebut, yang menjadi bagian dari transisi besar dari Orde Baru ke era Reformasi, hingga kini masih menyisakan luka. Sejumlah aktivis pro-demokrasi dilaporkan diculik, dan beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Meskipun Prabowo tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, ia diberhentikan dari militer melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang menciptakan keraguan mendalam di sebagian kalangan terhadap kelayakannya sebagai pemimpin dalam sistem demokratis. Fakta ini menjadi pemicu utama perdebatan publik yang tajam dan emosional menjelang Pemilu 2024.

Permasalahan ini layak mendapatkan perhatian serius karena mencakup berbagai aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, tingkat polarisasi politik yang tinggi berpotensi merusak harmoni sosial dan mengancam kestabilan nasional, terutama bila wacana yang berkembang memicu benturan antar kelompok masyarakat. Kedua, kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan sejarah masa lalu menjadi sangat penting agar proses demokratisasi di Indonesia tidak terus dibayangi oleh luka kolektif yang belum terobati. Ketiga, memahami persepsi masyarakat terhadap sosok pemimpin yang sarat kontroversi seperti Prabowo merupakan indikator penting untuk mengukur kedewasaan demokrasi kita: apakah bangsa ini mampu belajar dari pengalaman masa lalu, atau justru terperosok kembali ke dalam kesalahan yang sama. Lebih jauh lagi, muncul serangkaian pertanyaan kunci yang perlu dijawab secara reflektif: Apakah perubahan sikap dan strategi politik dari seorang tokoh mampu menghapus rekam jejak masa lalunya? Seberapa besar peran ingatan bersama masyarakat dalam memengaruhi preferensi politik di era dominasi media digital? Dan apakah mungkin polarisasi politik yang tajam bisa diatasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi?

Berdasarkan urgensi yang telah diuraikan, tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menginvestigasi secara komprehensif akar serta dinamika polarisasi politik yang mengemuka dalam Pemilu 2024, dengan titik fokus pada pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden. Kajian ini berupaya mengurai secara kritis berbagai argumen yang mendasari dukungan maupun penolakan terhadap figur Prabowo, baik ditinjau dari aspek historis yang berkaitan dengan masa lalu kontroversialnya, maupun dari perkembangan politik dan strategi komunikasi mutakhir yang ia gunakan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana peristiwa 1997/1998 membentuk persepsi publik melalui lensa memori kolektif, serta menelaah sejauh mana strategi politik yang diterapkan Prabowo berhasil memengaruhi dan mengelola opini masyarakat terhadap isu-isu sensitif yang membayangnya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan analisis ini mampu memberikan gambaran utuh mengenai kompleksitas relasi antara sejarah, persepsi, dan pertarungan narasi dalam kontestasi demokratis di Indonesia.

Signifikansi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian ilmu politik dan komunikasi politik di Indonesia, tetapi juga pada potensi penerapannya dalam menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan demokratis. Dengan memahami akar polarisasi serta narasi

yang berkembang di balik figur calon presiden, masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih kritis, objektif, dan rasional dalam menentukan pilihan politik. Lebih jauh lagi, kajian ini berfungsi sebagai bahan refleksi nasional. Masyarakat perlu diberdayakan agar tidak terjebak dalam politik identitas yang sempit atau fanatisme tanpa dasar. Di saat yang sama, elite politik dan media diharapkan dapat memainkan peran lebih konstruktif dalam meredam polarisasi dan menciptakan iklim politik yang inklusif. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga masyarakat yang cerdas secara politik dan sejarah yang dihadapi secara terbuka. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting bukan hanya untuk memahami fenomena Pemilu 2024, tetapi juga untuk membangun fondasi demokrasi yang lebih matang dan dewasa di Indonesia. Polarisasi mungkin tidak dapat dihindari, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam dan dialog yang terbuka, dampak negatifnya dapat diminimalkan, bahkan dijadikan pelajaran berharga untuk memperkuat kebangsaan kita bersama.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menelaah secara komprehensif dinamika polarisasi politik yang muncul dalam kaitannya dengan pencalonan Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2024. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial-politik yang bersifat kompleks melalui analisis mendalam terhadap makna yang tersembunyi dalam teks dan wacana publik.

Studi literatur dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi, melainkan juga sebagai proses analitis yang melibatkan evaluasi kritis terhadap berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, seperti artikel ilmiah, media daring, dan dokumen resmi. Selain itu, penulis juga melakukan riset mandiri dengan menelaah dan mengkaji sejumlah jurnal ilmiah yang relevan sebagai bahan utama dalam penyusunan artikel ini. Jurnal-jurnal tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk memperkuat argumen, memperluas sudut pandang, dan memberikan dasar teoritis yang mendalam terhadap topik yang dibahas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana opini publik dan konstruksi narasi politik terbentuk, serta menggambarkan dinamika sosial yang menyertai pencalonan figur politik seperti Prabowo Subianto.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Polarisasi Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "polarisasi" merujuk pada proses atau tindakan pemisahan menjadi dua kelompok yang berlawanan, termasuk dalam konteks kepentingan tertentu. Dengan kata lain, polarisasi menggambarkan perbedaan pandangan dan dukungan politik di masyarakat, terutama dalam menanggapi isu-isu politik, serta menciptakan pembagian antara kelompok "kami" dan mereka. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dukungan terhadap pandangan politik yang ekstrem dan munculnya rasa saling tidak percaya serta kebencian antar kelompok (Mansyur, 2023). Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah akibat perbedaan pilihan politik, yang sering kali menimbulkan ketidakpercayaan dan kebencian antar kelompok, bahkan berujung pada permusuhan. Para ilmuwan politik mengklasifikasikan polarisasi ini ke dalam dua tingkatan, yaitu polarisasi elit dan polarisasi massa. Polarisasi elit berkaitan dengan perpecahan di kalangan tokoh politik seperti pejabat dan pengurus partai, sementara polarisasi massa terjadi di tingkat masyarakat umum, termasuk para pemilih. Pada Pemilu 2024 di Indonesia yang berlangsung pada 14 Februari 2024, salah satu tantangan utama yang selalu muncul dalam setiap pemilu adalah polarisasi politik.

Polarisasi ini berpotensi memecah belah masyarakat dan dapat mengarah pada konflik yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, memahami realitas polarisasi politik serta mencari solusi untuk mengatasinya atau setidaknya mengurangi dampaknya menjadi hal yang sangat penting. Polarisasi mengacu pada terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki perbedaan tajam dalam hal pandangan politik, ideologi, nilai, atau agama. Dalam konteks pemilu, polarisasi sering terjadi ketika terdapat dua kandidat atau partai dengan perbedaan pandangan yang sangat kontras, sehingga masyarakat terbagi menjadi dua kubu yang saling berseberangan (Fathurochman & Tutiasri, 2023).

Faktor-faktor yang memengaruhi polarisasi dalam Pemilu 2024

Polarisasi politik dalam Pemilu 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek ideologi, media, maupun strategi politik yang digunakan oleh para elite. Berikut adalah faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap polarisasi (Rianadiwa et al., 2024):

- Perbedaan Ideologi dan Identitas Politik: Salah satu penyebab utama polarisasi adalah perbedaan

ideologi dan identitas politik. Perbedaan pandangan, visi, serta program yang diusung oleh masing-masing kandidat dan partai politik menyebabkan masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki preferensi berbeda. Selain itu, faktor identitas, seperti suku, agama, dan latar belakang sosial, turut memperkuat perbedaan tersebut.

- Pengaruh Media Sosial dan Missinformasi: Algoritma media sosial secara otomatis menyajikan konten yang selaras dengan pandangan politik penggunanya, sehingga masyarakat lebih sering terpapar informasi yang menguatkan bias mereka. Hal ini menyebabkan berkurangnya keterbukaan terhadap sudut pandang lain, memperkuat keyakinan kelompok tertentu, dan mempersempit ruang diskusi yang sehat. Di sisi lain, penyebaran hoaks, propaganda, serta disinformasi yang masif semakin memperburuk keadaan. Berita palsu yang beredar luas sering kali memicu kesalahpahaman, memperkeruh situasi politik, dan meningkatkan ketegangan di antara kelompok yang berseberangan.
- Peran Elite Politik dan Polarisasi Strategis: Elite politik sering menggunakan strategi polarisasi untuk menggali dukungan, meskipun dapat memperburuk perpecahan sosial. Pernyataan yang provokatif dari para pemimpin politik dapat meningkatkan ketegangan dan memperdalam polarisasi.
- Sentimen terhadap Kandidat dan Rekam Jejak Masa Lalu: contohnya seperti Prabowo Subianto menjadi tokoh yang kontroversial, dengan sebagian masyarakat mendukungnya atas dasar pengalaman dan kepemimpinan, sementara lainnya menolak karena keterkaitannya dengan peristiwa 1997/1998.
- Fragmentasi Media dan Narasi Politik yang Berbeda: Media massa sering kali berpihak pada kubu tertentu, menyebabkan masyarakat hanya mengakses berita yang memperkuat opini mereka sendiri. Narasi politik yang dibangun oleh masing-masing media semakin memperparah perbedaan sudut pandang.
- Fanatisme Politik dan Polarisasi Emosional: Fanatisme terhadap kandidat tertentu membuat sebagian masyarakat sulit menerima perbedaan pendapat. Polarisasi emosional lebih didasarkan pada loyalitas dan bukan pada pertimbangan rasional.
- Ketidakpuasan terhadap Pemerintah dan Ketimpangan Sosial: Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa dapat memicu dukungan bagi oposisi, memperkuat polarisasi politik. Ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi faktor yang memperburuk perpecahan di masyarakat.

Sejarah Peristiwa 1997-1998 dan Dampaknya

Peristiwa tahun 1997–1998 merupakan salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia. Masa ini ditandai dengan krisis multidimensional yang meliputi ekonomi, politik, dan sosial, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Salah satu isu utama pada periode ini adalah penghilangan paksa terhadap aktivis pro-demokrasi yang dilakukan secara sistematis oleh aparat keamanan negara. Sejumlah tokoh militer kala itu diduga terlibat dalam operasi-operasi tersebut, yang bertujuan meredam suara oposisi menjelang Sidang Umum MPR 1998. Kasus ini kembali mengemuka dalam ranah publik seiring keterlibatan beberapa individu yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, termasuk Prabowo Subianto, dalam kontestasi politik nasional seperti Pemilu 2024. Prabowo Subianto, yang pada masa itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dituduh terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis. Meskipun tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa secara hukum, namanya terus dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM berat ini. Penanganan kasus tersebut diselesaikan secara internal melalui Dewan Kehormatan Perwira, bukan jalur peradilan. Berdasarkan catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), hingga kini masih terdapat 13 orang yang dinyatakan hilang tanpa jejak. Peristiwa ini membekas dalam memori publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap figur-figur yang dianggap terkait, khususnya menjelang pemilihan umum (Aditia et al., 2014).

Selain penghilangan paksa, tragedi Mei 1998 menjadi puncak eskalasi krisis, ditandai oleh kerusuhan massal, penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan, terutama terhadap perempuan Tionghoa. Kekerasan ini terjadi dalam suasana gejolak politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Penegakan HAM terhadap kasus-kasus ini sangat lemah. Kelemahan sistem hukum nasional, campur tangan politik, serta kurangnya independensi lembaga peradilan menjadi hambatan utama dalam upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat (Sobarnapraja, 2020). Komnas HAM menyimpulkan bahwa penghilangan paksa terhadap para aktivis dilakukan secara sistematis dan dalam skala luas, sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7(1)(i) Statuta Roma yang menetapkan bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap populasi sipil dengan persetujuan negara. Meskipun demikian, Indonesia

belum meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) tahun 2006, yang menyebabkan terbatasnya kerangka hukum untuk melindungi hak-hak korban dan keluarga mereka (Ashri et al., 2021).

Di tengah stagnasi penyelesaian kasus-kasus HAM berat, masyarakat sipil menunjukkan bentuk perlawanan yang kuat melalui Aksi Kamisan, yang dimulai sejak 2007. Setiap hari Kamis, keluarga korban dan aktivis berkumpul di depan Istana Negara dengan membawa payung hitam sebagai simbol tuntutan keadilan. Meskipun kerap menghadapi intimidasi dan tekanan politik, Aksi Kamisan berhasil menjadi ikon perjuangan damai dan alat untuk membangun kesadaran publik terhadap pentingnya penyelesaian kasus HAM masa lalu (Penuntasan et al., 2023). Keluarga korban kekerasan politik, seperti Maria Catarina Sumarsih, memaknai perjuangan mereka bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai upaya untuk menjaga ingatan dan menyuarakan kebenaran. Melalui narasi pribadi dan kolektif, mereka membangun identitas sosial baru yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Upaya ini tidak hanya penting dalam konteks penyembuhan trauma, tetapi juga sebagai kontribusi dalam merawat demokrasi dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan (*POTRET KEKERASAN POLITIK (9).Pdf*, n.d.).

Bayang-bayang tragedi 1997–1998 hingga kini masih terasa dalam lanskap politik Indonesia. Isu-isu yang belum terselesaikan menyebabkan munculnya polarisasi di tengah masyarakat, khususnya saat figur-figur yang terkait dengan peristiwa tersebut mencalonkan diri dalam jabatan publik. Bagi sebagian masyarakat, masa lalu itu menjadi dasar untuk menolak, sementara bagi sebagian lain, hal itu dianggap telah usai dan tidak relevan dengan situasi politik kontemporer. Dengan demikian, sejarah 1997–1998 tetap menjadi referensi penting dalam memahami dinamika sosial-politik Indonesia saat ini (Aditia et al., 2014).

Pro dan Kontra Prabowo Menjadi Presiden.

Pencalonan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat. Pendukungnya menganggap ia sebagai figur pemimpin yang tegas dan berpengalaman, sementara penentangannya menyoroti rekam jejaknya, terutama terkait peristiwa 1997/1998 dan isu hak asasi manusia (HAM). Berikut adalah analisis terhadap argumen pro dan kontra pencalonan Prabowo sebagai Presiden.

- Argumentasi pendukung: Pendukung Prabowo mengedepankan beberapa faktor utama yang dianggap sebagai keunggulan dalam kepemimpinannya (Aditia et al., 2014):
 - Pengalaman Militer dan Kepemimpinan yang Tegas. Prabowo memiliki latar belakang sebagai mantan perwira tinggi militer, termasuk pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pendukungnya menilai latar belakang ini menjadikannya sebagai pemimpin yang tegas dan mampu menangani isu-isu keamanan nasional dengan baik.
 - Perubahan Citra dan Pendekatan Politik yang Lebih Moderat. Sejak bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berhasil membangun citra yang lebih nasionalis dan dekat dengan berbagai kelompok politik. Pendukungnya melihat ini sebagai bukti bahwa ia mampu beradaptasi dan membangun koalisi yang luas demi kepentingan bangsa.
 - Visi Indonesia Maju dan Kebijakan Nasionalisme Ekonomi. Prabowo menawarkan visi kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional, termasuk mendorong industri pertahanan dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya. Dukungan Politik dan Elektabilitas yang Kuat. Sejumlah survei menunjukkan bahwa Prabowo memiliki basis pemilih yang solid dan elektabilitas yang relatif stabil dibandingkan kandidat lain. Dukungan dari berbagai partai politik serta aliansi dengan tokoh-tokoh strategis semakin memperkuat posisinya dalam Pemilu 2024.
- Argumentasi penentang: Di sisi lain, terdapat kelompok yang menolak Prabowo sebagai Presiden dengan beberapa alasan utama berikut (Jurnal & Sosial, 2024):
 - Keterkaitan dengan Peristiwa 1997/1998 dan Isu HAM. Prabowo dituduh terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi pada masa Reformasi. Meskipun tidak pernah diadili secara hukum, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI menyatakan bahwa ia diberhentikan dari dinas militer akibat dugaan keterlibatan dalam kasus tersebut. Banyak kelompok pro-demokrasi dan aktivis HAM yang menilai bahwa rekam jejak ini menjadikannya tidak layak untuk memimpin negara demokratis seperti Indonesia.
 - Gaya Kepemimpinan yang Otoriter. Sebagian pihak khawatir bahwa latar belakang militer Prabowo akan mendorong gaya kepemimpinan yang lebih otoriter dan kurang demokratis.

- Kekhawatiran ini muncul dari sejumlah pernyataannya yang dianggap terlalu konfrontatif terhadap kebebasan pers dan oposisi politik.
- Kehadiran Prabowo dalam Politik Identitas dan Polarisasi. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, pendukung Prabowo dituding memainkan politik identitas, yang dinilai semakin memperburuk polarisasi sosial. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ia berusaha mengubah pendekatannya, sebagian masyarakat masih mengaitkan dirinya dengan politik berbasis sektarianisme.
 - Kritik terhadap Kinerja sebagai Menteri Pertahanan. Beberapa pihak menilai bahwa selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo belum menunjukkan capaian yang signifikan, terutama dalam modernisasi alutsista dan tata kelola pertahanan. Transparansi dalam anggaran pertahanan juga menjadi sorotan, mengingat besarnya anggaran yang dikelola kementeriannya.

Pengaruh peristiwa 1997/1998 terhadap opini publik.

Peristiwa 1997/1998 merupakan salah satu titik balik dalam sejarah politik Indonesia, yang tidak hanya mengubah sistem pemerintahan tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang terhadap persepsi publik terhadap figur-figur yang terlibat pada masa itu, termasuk Prabowo Subianto. Bagi sebagian masyarakat, keterlibatan Prabowo dalam peristiwa tersebut—khususnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait penculikan aktivis pro-demokrasi—menjadi alasan utama untuk menolak kepemimpinannya. Kelompok ini berpendapat bahwa latar belakang Prabowo dalam militer dan kontroversi seputar masa lalu membuatnya kurang layak untuk memimpin negara demokratis seperti Indonesia. Narasi ini diperkuat oleh organisasi HAM, aktivis, serta pihak oposisi yang terus menyoroti isu tersebut dalam berbagai kampanye politik. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang menganggap bahwa peristiwa 1997/1998 sudah seharusnya menjadi bagian dari sejarah yang tidak lagi relevan dalam menilai Prabowo saat ini. Mereka berargumen bahwa Prabowo telah mengalami transformasi dalam perjalanan politiknya dan kini lebih berorientasi pada pembangunan serta kepentingan nasional. Selain itu, mereka juga menyoroti bahwa tidak ada putusan hukum yang secara resmi menyatakan keterlibatan langsung Prabowo dalam pelanggaran HAM, sehingga tuduhan terhadapnya lebih bersifat politis. Banyak juga yang beranggapan bahwa sosok pemimpin berlatar belakang militer dianggap memiliki ketegasan dan disiplin, yang dianggap penting dalam memimpin negara (Jurnal & Sosial, 2024).

Perbedaan pandangan ini semakin dipertegas oleh polarisasi yang terjadi di media sosial dan media massa. Media yang mendukung Prabowo cenderung menampilkan narasi bahwa ia telah berubah menjadi pemimpin yang lebih demokratis dan nasionalis, sementara media yang menentangnya terus mengangkat isu 1997/1998 sebagai peringatan bagi pemilih. Akibatnya, opini publik terhadap Prabowo tetap terbagi, dengan sebagian masyarakat melihatnya sebagai harapan baru bagi Indonesia dan sebagian lainnya tetap menolak karena trauma sejarah masa lalu. Dalam konteks Pemilu 2024, peristiwa 1997/1998 masih menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan pemilih. Bagi generasi yang mengalami langsung era reformasi, memori kolektif tentang peristiwa tersebut masih membentuk cara pandang mereka terhadap kepemimpinan Prabowo. Sementara itu, bagi generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, opini mereka lebih banyak dipengaruhi oleh narasi yang berkembang di media dan lingkungan sosial mereka (Ilham Kurniawan, 2024).

Sebagian masyarakat tetap merasa bahwa kasus pelanggaran HAM belum dituntaskan secara adil, dan oleh karena itu, figur-figur yang dianggap terlibat belum layak untuk diberikan kepercayaan publik. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa hingga kini pemerintah belum memberikan penanganan hukum yang tegas terhadap kasus penghilangan paksa dan kekerasan pada masa transisi Orde Baru (Sobarnapraja, 2020). Gerakan sipil seperti Aksi Kamisan menunjukkan bentuk konkret dari opini publik yang menolak melupakan sejarah. Dengan membawa payung hitam setiap Kamis di depan Istana Negara, para peserta Aksi Kamisan menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Gerakan ini, meskipun sering dihadang tekanan dan intimidasi, tetap eksis sebagai simbol perlawanan moral terhadap impunitas (Penuntasan et al., 2023). Selain itu, peran narasi pribadi dari keluarga korban kekerasan politik memperkuat kesadaran kolektif masyarakat. Tokoh seperti Maria Catarina Sumarsih mewakili suara para keluarga korban yang terus memperjuangkan keadilan bukan untuk balas dendam, tetapi demi pengakuan dan kebenaran sejarah. Nilai-nilai ini juga turut membentuk opini publik, terutama di kalangan generasi

muda yang mulai memahami pentingnya keadilan transisional dalam demokrasi (*POTRET KEKERASAN POLITIK (9).Pdf*, n.d.).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa 1997/1998 memiliki pengaruh mendalam terhadap opini publik Indonesia. Baik sebagai bentuk penolakan terhadap tokoh tertentu, maupun sebagai bahan refleksi untuk menilai kembali masa lalu bangsa, tragedi ini masih menjadi referensi kuat dalam dinamika politik nasional. Opini publik terbentuk melalui ingatan sejarah, pengalaman sosial, media, serta narasi korban, menjadikannya medan wacana yang kompleks dan penuh makna.

Kesimpulan

Polarisasi politik dalam Pemilu 2024 semakin menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, terutama dalam konteks pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. Perbedaan pandangan antara pendukung dan penentang tidak hanya didasari oleh program kerja dan visi kepemimpinan, tetapi juga oleh rekam jejak sejarah yang belum tuntas, khususnya peristiwa 1997/1998 yang masih membekas dalam memori kolektif publik. Polarisasi ini diperburuk oleh penyebaran disinformasi melalui media sosial, penggunaan identitas sebagai alat politik, serta strategi elite politik yang seringkali memperuncing konflik. Meski demikian, Prabowo tetap memiliki pendukung kuat yang melihat dirinya sebagai pemimpin berpengalaman dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Keberadaan pro-kontra ini menunjukkan bahwa trauma sejarah masih menjadi faktor signifikan dalam membentuk lanskap politik Indonesia. Untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah disintegrasi sosial pasca-pemilu, diperlukan tata kelola politik yang lebih moderat dan rekonsiliatif, serta penguatan pendidikan politik yang kritis dan toleran. Masyarakat sipil perlu diberdayakan agar tidak mudah terjebak dalam fanatisme dan manipulasi politik. Di masa mendatang, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada dampak polarisasi terhadap generasi muda serta efektivitas strategi komunikasi politik dalam meredakan ketegangan sosial. Dengan pendekatan interdisipliner, kajian ini diharapkan mampu mendorong perkembangan ilmu politik sebagai alat refleksi, rekonsiliasi, dan transformasi sosial di Indonesia.

REFERENCES

- Aditia, H., Santosa, H. P., & Pradekso, T. (2014). Interpretasi Khalayak terhadap Impression Management Prabowo Subianto dalam Iklan Politik di Televisi. *Interaksi Online*.
- Ashri, A. M., Studi, P., Hukum, I., Internasional, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2021). *Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa*.
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (2023). Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6837–6845. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2833>
- Ilham Kurniawan. (2024). Strategi Marketing Politik dan Personal Branding Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024. *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 29(1), 68–80. <https://doi.org/10.37817/ikon.v29i1.3739>
- Jurnal, S., & Sosial, I. (2024). *Catatan Masa Lalu Terkait Pencapresan Prabowo dan Prediksi Indonesia di Masa Depan*. 3(4), 416–429. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i4.4331>
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- Penuntasan, U., Ham, K., & Indonesia, D. I. (2023). *Aksi kamisan: tantangan dan kekuatan dalam upaya penuntasan kasus ham di indonesia*. 17(02), 45–50.
- POTRET KEKERASAN POLITIK (9).pdf*. (n.d.).
- Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Triadi Salam, V., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 169–179.
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>